

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKERTARIS DAERAH  
 NOMOR : 188/02/409.116/KPTS/2020  
 TANGGAL : 02 JANUARI 2020

## DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2020

NO	JENISINFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSINEGATIF	RELEVANSI/ALASAN	RETENSIWAKTU
1.	Pengadaan Barang dan Jasa	1. UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3	Persaingan Usaha yang tidaksehat / kompetitor	Selama dalam proses lelang / pengadaan sebelum diumumkan	Sampai ditetapkan pemenang lelang dan diumumkan
2.	Bio Data Kependudukan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 g,h 2. UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 85 ayat 3 3. UU No. 24 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 84 ayat 1	1. Privacy 2. Kemungkinan penyalahgunaan informasi	Melindungi perseorangan, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.	Permanen
3.	Data Pegawai ASN	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h 2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127 3. UU 25 Tahun 2014 Pasal 128	Menjamin efisiensi dan efektifitas pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Efektivitas dan akurasi data ASN	Selama masih berlaku

4.	Hasil Laporan Keuangan yang Belum diaudit oleh BPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31</li> <li>4. Permendagri 13 Tahun 2006</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara</li> <li>2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi publik</li> </ol>	Kelancaran proses pemeriksaan	Sampai laporan hasil pemeriksaan BPK
5.	Catatan Medis / Rekam Medis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 g,h</li> <li>2. Permenkes RI No 269/Menkes/Per/III/2008</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyangkut masalah privacy</li> <li>2. Kemungkinan penyalahgunaan informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk kepentingan kesehatan pasien</li> <li>2. Relevan, kepentingan penyidikan pihak yang berwajib</li> </ol>	Permanen
6.	Dokumen LHKPN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j</li> <li>2. UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 322</li> <li>3. UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan asal 44</li> <li>4. Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No.Kep.07/KPK/02/2005 Tata cara pendaftaran, Pengumumandan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengganggu kenyamanan Privacy</li> <li>2. Timbulnya penyimpangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relevan, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum</li> <li>2. Menjaga keakuratan data pemeriksaan</li> <li>3. Mencegah terjadinya tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang</li> </ol>	Sampai LHKPN ditetapkan

7.	Data Pengaduan Masyarakat, laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uu No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>2. UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 6</li> <li>3. Uu No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyangkut Privacy</li> <li>2. Mengganggu proses penyelidikan / pengawasan</li> </ol>	Menjaga kelangsungan proses hukum	Sampai ada keputusan hasil pengaduan
8.	Data Pribadi penerima bantuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ol>	Informasi public yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi orang	Keamanan individu	Sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan
9.	Proses Penawaran Harga Satuan Lelang Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ol>	Menjaga data penawaran peserta lelang terkait dengan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Persaingan usaha yang sehat	Permanen
10.	Dokumen penawaran pengadaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 b</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ol>	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Perlindungan usaha	Sampai proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak kerjasama
11.	Hasil Audit keamanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>3. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b)</li> <li>4. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016</li> </ol>	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan system informasidan data	Permanen

12.	Data SP2D Pihak Ke-3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 No. 2</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31</li> <li>4. Permendagri 13 Tahun 2006</li> </ol>	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	Perlindungan Usaha	Permanen
13.	Proses Evaluasi Pengadaan Barang / Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ol>	Melindungi pelanggan tetap dapat di pertanggungjawabkan	Perlindungan usaha	Permanen
14.	Rincian Informasi Terkait (Nomor rekening perusahaan dan metodologi pelaksanaan) yang terdapat dalam dokumen kontrak pengadaan barang / jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi para pihak yang terlibat kontrak</li> <li>2. Menghindari permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait</li> </ol>	Perlindungan usaha	<p>Sampai dengan penandatanganan perjanjian / kontrak</p> <p>Sampai dengan penyerahan berkas</p>
15.	Hasil Pengujian Keamanan Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>3. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b)</li> <li>4. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016</li> </ol>	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan system informasi dan data	Permanen
16.	Sistem persandian meliputi surat masuk dan surat keluar yang berkualifikasi sandi, data jumlah dan informasi tentang material sandi metode dan teknik aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ol>	Melindungi informasi idari kebocoran	Keamanan data strategis	Permanen

17.	Source Kode Aplikasi Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37</li> <li>4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b)</li> <li>5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016</li> </ol>	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan data	Permanen
18.	Proses Penyerapan APBD SKPD dan PPKD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31</li> </ol>	Proses pengawasan keuangan Oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	Otentik data pengelolaan anggaran	Sampai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Opini atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 2-15 oleh BPK dikeluarkan oleh BPK.
19.	IP Address Privat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>3. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 30-37</li> <li>4. PPPSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b)</li> <li>5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016</li> </ol>	Menjaga data, arsip dan dokumentasi yang bersifat rahasia terkait dengan hak atas kekayaan intelektual	Keamanan system aplikasi Dan data	Permanen
20.	Dokumen Perjanjian Kerjasama	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Melindungi dan mengamankan data	Dapat merugikan kepentingan hubungan keduabelah pihak	Permanen
21	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Melindungi dan mengamankan data	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasar undang-undang.	Permanen

22.	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Melindungi dan mengamankan data	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Permanen
23.	Dokumen dan berita cara pembinaan aparatur	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Melindungi dan mengamankan data	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Permanen

Blitar, 02 Januari 2020

**An. BUPATI BLITAR  
SEKRETARIS DAETAH**

